



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 486-503

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pola Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus Program Gandeng Gendong)

Daris Yulianto^{1✉}

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan

Email: darisaan79@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola Collaborative Governance (CG) dalam Program Gandeng Gendong ('GaGe') di Kota Yogyakarta, menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008). Program ini membuktikan bahwa CG dapat menjadi solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah, komunitas, korporasi, kampus, dan kampung (5K). Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta dari 34.000 jiwa (8%) pada 2021 menjadi 29.000 jiwa (6%) pada 2023. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kolaborasi 5K terbentuk dengan baik, dengan Pemerintah Kota Yogyakarta (Bappeda dan Kesra) sebagai leading sector. Program 'GaGe' e- Nglarisi berjalan baik melibatkan masyarakat menengah ke bawah, meskipun Perwal No. 23 Tahun 2018 belum diperbarui. Indikator CG Ansell dan Gash terlihat menonjol pada kepemimpinan fasilitatif, Pemkot Yogyakarta memberikan kesempatan luas bagi UMKM untuk terlibat dalam penyediaan makanan dan minuman di lingkungan OPD. Desain kelembagaan dan komitmen 5K juga mendukung proses kolaborasi. Namun, ditemukan kendala seperti keterbatasan modal UMKM, terutama dalam memenuhi pesanan berkelanjutan, serta kurang optimalnya penggunaan aplikasi e-Nglarisi karena preferensi pemesan (OPD) terhadap WhatsApp yang lebih cepat. Berdasarkan temuan, disarankan untuk: memperbarui Perwal, meningkatkan fungsionalitas aplikasi e-Nglarisi dan mengintegrasikannya dengan platform lain, memberikan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan akses modal, mengoptimalkan peran kampus dalam pendampingan berbasis data, memperkuat sinergi 5K melalui forum rutin, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, serta mengembangkan model keberlanjutan dan evaluasi berkala. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam memahami tata kelola kolaboratif menuju good governance yang unggul dan berkelanjutan.

Keywords: *Pola, Collaborative Governance, Gandeng Gendong.*

Abstract

This study examines the pattern of Collaborative Governance (CG) in the Gandeng Gendong Program ('GaGe') in Yogyakarta City, using the theoretical framework of Ansell and Gash (2008). The program demonstrates that CG can be an effective solution for poverty alleviation through synergistic collaboration between the government, community, corporations, universities, and villages (5K). BPS data shows a decline in poverty in Yogyakarta from 34,000 people (8%) in 2021 to 29,000 people (6%) in 2023. A descriptive qualitative method was used to analyze the program's implementation. The results indicate that the 5K collaboration pattern is well-established, with the Yogyakarta City Government (Bappeda and Kesra) as the leading sector. The 'GaGe' – Nglarisi program runs well by involving lower-middle-class communities, although Mayor Regulation (Perwal) No. 23 of 2018 has not yet been updated. The CG indicators from Ansell and Gash are prominent in facilitative leadership, where the Yogyakarta City Government provides extensive opportunities for UMKMs to participate in providing food and beverages within the OPD environment. Institutional design and the commitment of the 5K also support the collaboration process. However, challenges were identified, such as limited capital for UMKMs, particularly in fulfilling continuous orders, and the suboptimal use of the e-Nglarisi application due to the preference of ordering parties (OPDs) for WhatsApp, which is faster. Based on the findings, it is recommended to: update Perwal, enhance the functionality of the e-Nglarisi application and integrate it with other platforms, provide training and mentoring for UMKMs to improve capacity and access to capital, optimize the role of universities in data-based mentoring, strengthen 5K synergy through regular forums, increase program transparency and accountability, and develop sustainable models and periodic evaluations. This study provides a positive contribution to understanding collaborative governance towards superior and sustainable good governance.

Keywords: Pattern, Collaborative Governance, Gandeng Gendong.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik dan unggul merupakan tuntutan masyarakat modern untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Inovasi dalam tataran keilmuan dan praktik terus berkembang dan saling melengkapi, yang pada gilirannya akan memunculkan praktik-praktik baik (*best practices*) dalam pengelolaan pemerintahan yang didukung oleh para akademisi. Para akademisi terus mengembangkan keilmuan termasuk pada bagaimana menciptakan pola tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Paradigma *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) menjadi salah satu konsep kepublikan yang terus berkembang sampai saat ini, dan menarik untuk terus dikembangkan dan dipraktikkan di pemerintahan. Hal ini terlihat pada banyaknya akademisi yang meneliti dan menulis konsep tata kelola kolaboratif ini dalam beberapa buku dan jurnal ilmiah.

Collaborative Governance (CG) muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell C., Gash A, 2008).

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dan untuk mengatasinya perlu melibatkan banyak pihak. Perlunya *CG* yang melibatkan orang dan organisasi melintasi batas, menyelesaikan satu masalah bersama, dan tata kelola kolaboratif dimaksudkan mendorong tindakan atau hasil yang tidak mungkin dicapai oleh organisasi manapun yang bertindak sendiri (Emerson & Nabstchi, 2015). Salah satu cara menurunkan angka kemiskinan adalah dengan program yang pro terhadap rakyat (Bakhtiar & Qodir, 2015).

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018 tentang Program *Gandeng Gendong (Gage)* Kota Yogyakarta, mencoba menggandeng semua *stakeholder* pembangunan, yang melibatkan 5K meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas. Bertujuan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan titik tekan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan lingkungan di Kota Yogyakarta. Kata '*Gandeng*' bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dengan tujuan saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Sedangkan kata '*Gendong*' memiliki makna masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan. Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Masyarakat yang lemah dibantu dengan di '*Gendong*', yang terpinggirkan ditarik '*Gandeng*' ke tengah agar bisa berjalan bersama (Menpanrb, 2020).

Data BPS menunjukkan kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2023 berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2021 sejumlah 34.000 jiwa atau 8%, tahun 2022 sejumlah 30.000 jiwa atau 7% dan pada tahun 2023 sejumlah 29.000 jiwa atau 6% (BPS, 2024). Keberhasilan program ini juga telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu top 99 dan 15 Finalis kelompok khusus Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020. Inovasi ini mencoba mengoptimalkan pemanfaatan potensi kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya melibatkan banyak unsur dan komponen, tentu saja menjadi tantangan tersendiri dan mungkin ditemui banyak masalah. Beberapa kendala seperti semua elemen belum bisa ikut dalam program, belum terbentuk aturan dasar yang menguatkan *GaGe*, dan kelurahan belum mampu berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompok *GaGe* (Iza & Nurhaeni, 2021). Kendala lain seperti minimnya

sosialisasi program, pelatihan dan pemberdayaan, sehingga berefek memburuknya pelaksanaan program (Putra, Elsyra, & Zaenuri, 2020).

Fenomena penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta yang baik, dan hasil observasi peneliti yang melihat langsung penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance*, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan menulis artikel ini. Artikel ini berfokus pada *GaGe* khususnya pada sektor *culinary* (penyediaan sediaan makan dan minuman). Pelaksanaan program *GaGe* khususnya pada penyediaan jamuan makan dan minuman didukung oleh aplikasi *Nglarisi*. Aplikasi ini sebagai *marketplace* penjualan dari kelompok *Nglarisi* kepada konsumen khususnya pemerintah Kota Yogyakarta. Penggunaan aplikasi digital dalam mendukung proses transaksi antara kelompok dan pemerintah kota dimanfaatkan supaya transaksi penjualan yang terjadi dapat didokumentasi dengan baik, (Bappeda, 2023).

Menganalisis pola suatu kebijakan merupakan instrumen penting untuk mempelajari, memahami, memprediksi, dan meningkatkan efektivitas suatu kebijakan publik. Analisis pola program yang merupakan produk dari suatu kebijakan. Dengan memahami pola-pola ini diharapkan pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan mencapai tujuan bersama (Howlett & Ramesh, 2003). Michael Howlett dan M. Ramesh dalam mengembangkan Teori Pola Kebijakan (*Policy Pattern*) untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik berubah dan berkembang. Kebijakan publik tidak muncul secara acak, melainkan mengikuti pola atau model yang dapat diidentifikasi, (Howlett & Ramesh, 2003). Basis teori ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan *CG* dalam merumuskan komponen utama pembentuknya (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Kata model dapat diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI, 2024). Model dapat juga diartikan sebagai sebuah gambaran realitas yang disederhanakan (Ferdinand, 2006). Sehingga, model atau pola adalah suatu sistem kerja yang merupakan deskripsi realitas dari sesuatu yang dibuat atau dihasilkan kemudian disederhanakan dan disajikan yang dapat digunakan baik secara teori maupun praktik.

Mengartikan *CG* merupakan suatu cara tata kelola pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell C., Gash A, 2008). Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul

komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher & Innes, 2002). Edward DeSeve mendefinisikan *CG* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas (Sudarmo, 2015). Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan *CG* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "*hybrid*" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Tata kelola ini akan membentuk pola kolaborasi yang akan mengatur suatu kebijakan publik suatu lembaga publik dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Teori tersebut mensyaratkan suatu tata kelola pemerintahan yang berbasis *CG* harus melibatkan pihak-pihak terkait baik dari penggagas / inisiator kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah dan non-pemerintah. Pendapat ahli lainnya adalah Jung dalam (Iza & Nurhaeni, 2021) menyatakan bahwa *CG* adalah proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan memonitor segala pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri sehingga dilaksanakan oleh beberapa pihak yang bukan lembaga publik.

Model *CG* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Ansell dan Gash pada tahun 2008, (Ansell C., Gash A, 2008) menyampaikan bahwa terdapat empat tahapan dalam menjalankan proses kolaborasi yaitu: (1) Kondisi awal (*Starting Condition*), (2) Kepemimpinan fasilitatif, (3) Desain kelembagaan (*Institutional Design*), dan (4) Proses kolaborasi, yang terdiri dari lima poin antara lain: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan kemenangan jangka menengah (*intermediat outcomes*).

Proses tata kelola kolaborasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pengetahuan tahapan dan pola *Collaborative Governance*. Beberapa pendapat para ahli tentang *CG* antara lain, dari (Silvia, 2011) *CG* merupakan sebuah paradigma baru dalam

memahami eksistensi multi *stakeholders* dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. Kolaborasi melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil (Goliday, 2010). *CG* sebagai bentuk *new public governance* mempunyai nilai dasar. Nilai dasar itulah yang menjadi karakteristiknya sekaligus muatan pokoknya. Dengan kata lain, nilai dasar itulah yang menjadi titik tekannya. Ada penekanan yang penting dipahami untuk memudahkan dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus membuat sebuah teori baru tentang administrasi dan kebijakan publik (Nasrulhaq, 2020). Model *CG* menurut (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) mencakup empat komponen utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif berkaitan dengan arti, konsep, definisi, karakteristik, perumpamaan, simbol dan deskripsi dari suatu hal (Howard Lune, Bruce L Berg, 2017). Metode ini tepat untuk melihat pola kebijakan *CG* menggunakan ukuran dari (Ansell C., Gash A, 2008). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan melakukan pertimbangan tertentu seperti misalkan orang yang dianggap mengetahui secara persis terkait obyek yang akan diteliti (Abdussamad, 2021). Informan urama adalah dari Kantor Walikota Kota Yogyakarta, Bappeda Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kampus, Komunitas dan Pelaku Usaha/Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, data dokumen maupun observasi. Sumber data utama yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil *interview* secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Implementasi Kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan melibatkan berbagai aktor. Memahami pola ini membantu kita untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana proses ini dapat dikaji dan dianalisis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Diantara bentuk dan cara melaksanakan implementasi kebijakan adalah menggunakan tata kelola *collaborative governance*. Tata kelola kolaboratif menekankan pada deliberatif dalam membuat sebuah kebijakan atau sebuah program. *CG* merupakan serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, yang berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset (Ansell C., Gash A, 2008). Berikut hasil dan pembahasan empat tahapan dalam menjalankan proses kolaborasi menurut (Ansell C., Gash A, 2008) :

Kondisi awal (*Starting Condition*), Program *GaGe* muncul dari kondisi sosial-ekonomi yang kompleks di Kota Yogyakarta, dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pemerintah menciptakan ruang kolaborasi melalui analisis kebutuhan masyarakat dan identifikasi potensi lokal. Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi pendorong awal yang kuat. Seiring berjalan dengan baik program *GaGe* timbul berbagai inovasi dalam menjadi media *breeding* produk *GaGe* seperti penerapan aplikasi *E-Nglarisi* sebagai pelebaran sayap terhadap program *GaGe* (Disperinkoukm, Report Analisis Survey Terhadap Evaluasi Aplikasi e-Nglarisi, 2023). Keseriusan Pemerintah Kota dalam meningkatkan kolaborasi yang melibatkan *stakeholder* dalam menyepakati *roadmap* dan program diwujudkan dalam Keputusan WaliKota Yogyakarta nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum *GaGe* Kota Yogyakarta. Pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan juga telah dibuat oleh Pemerintah Kota dengan diterbitkannya Keputusan WaliKota Yogyakarta nomor 157 tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta. Program *GaGe* ini memunculkan forum *GaGe* di masing-masing *stakeholder*, seperti pemkot, *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk korporasi, dari sisi akademisi ada koordinator di bidang akademisinya, dan seterusnya, itu semua diwadahi dalam forum *GaGe*, (Rinawati, 2024). Kondisi awal program di inisiasi dari program politik, untuk pemilihan walikota, tetapi dalam perjalannya program ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi pemberdayaan maupun mengangkat pendapatan bagi kaum miskin. Misi dan arahnya pada

mengentaskan kemiskinan, dimana para kelompok atau komunitas penyedia makan, mengajak masyarakat disekitarnya untuk terlibat dan mendapatkan order dari pemerintah kota, dan komunitas penyedia makanan tersebut dipaksa untuk mengajak atau melibatkan masyarakat miskin, (Prasojo, 2024). Inisiasi pemerintah kota ini sangat terlihat pada awal mula pelibatan komunitas dari masyarakat, didorong untuk berkembang dengan melibatkan masyarakat penggerak pemberdayaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Yogyakarta yang sekarang berganti nama Kota Yogyakarta (DP3AP2KB), menyampaikan bahwa Pemkot mempunyai anggaran yang setiap tahun harus dibelanjakan berwujud makan dan minum, tapi selama ini yang bisa mengakses adalah toko besar dan katering besar, sekarang dialihkan kepada UMKM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, (Mikatsih, 2024).

Program *GaGe* diluncurkan sebagai bagian dari strategi dan komitmen pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pemkot memiliki peran kunci dalam menginisiasi program dan menciptakan momentum politik untuk kolaborasi. Peran korporasi tertarik terlibat karena potensi *CSR* yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan sekaligus menyediakan fasilitas permodalan dan pelatihan bagi UMKM. Di sektor kampus, program ini sebagai peluang untuk pengabdian masyarakat dan penelitian terapan sehingga ada wadah yang tepat bagi civitas akademisi. Kampung, dengan adanya program *GaGe* ini Merasa memiliki harapan tinggi untuk peningkatan kesejahteraan. Dan Komunitas/Masyarakat bersemangat dan memiliki motivasi kuat untuk terlibat karena dampak langsung pada kehidupan mereka. Program ini dinilai berhasil memanfaatkan dan mengoptimalkan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepemimpinan fasilitatif (*Facilitative Leadership*), Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai fasilitator utama dalam program ini. Kepemimpinan yang inklusif dan visioner menciptakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan berbagai aktor untuk berpartisipasi aktif. Peran Walikota/Dinas terkait sangat dominan dalam memberikan kemudahan, Pemkot bertindak sebagai fasilitator utama dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi UMKM dalam mengembangkan usaha dan memastikan partisipasi aktif dari semua *stakeholder*. *GaGe* merupakan konsep besar bahwa konsep *pentahelic* ini merupakan kolaborasi 5K, contoh bagus untuk program *GaGe* ini adalah turunnya yaitu *Nglarisi*, ada surat edaran dan intruksi dari Walikota, dimana dari semua perangkat daerah diimbau untuk memesan makanan di *Nglarisi* dan itu sudah ada sistemnya, (Prasojo, 2024). Kepemimpinan fasilitatif merujuk pada peran pemimpin dalam memfasilitasi proses kolaborasi, termasuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif

dari semua elemen yang terlibat. Kepemimpinan fasilitatif ini juga terlihat pada elemen komunitas/masyarakat yang merupakan penerima manfaat utama dan sekaligus aktor kunci dalam keberhasilan program. Pemkot memberikan ruang seluas-luasnya bagi kami masyarakat kecil ini untuk tampil, bahkan pada event-event besar yang sebelumnya makanan dan minuman di kelola oleh brand-brand besar seperti P*, M* dan lain-lain, sekarang diberikan kepada kita (UMKM), ini merupakan keperpihakan Pemkot akan masyarakatnya sangat terlihat, (Mikatsih, 2024). Hasil dari proses kolaborasi ini terlihat pada masing-masing *stakeholder*, Pemerintah Kota/Walikota/Dinas terkait telah bertindak sebagai fasilitator pokok dengan membuka ruang dialog/komunikasi dan memastikan partisipasi aktif dari ke-lima *stakeholder*, sehingga Pemkot memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa semua dapat berjalan dengan baik.

Desain kelembagaan (*Institutional Design*), Desain kelembagaan program ini dirancang untuk memastikan partisipasi aktif semua pihak. Forum lintas sektor di tingkat kelurahan hingga kota menjadi wadah koordinasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan untuk membangun kepercayaan. Desain kelembagaan pada program *GaGe* ini terlihat pada dukungan Walikota dan Dinas terkait dalam mendesain atau merancang agar program ini saling terkait antara semua elemen dan hasil dari program ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terdapat forum *GaGe*, untuk pembinaan dan kelangsungan serta koordinasi pendampingan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkot Jogja. Sedang payung besarnya dari Bappeda Kota Jogja. Dinas DP3AP2KB Kota Yogyakarta, adalah pembinaan ekonomi perempuan dalam rintisan kelompok usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai koordinator di tingkat kelurahan atau komunitas. Terdapat aplikasi Pemkot Virtual, Jogja Smart Service (JSS), semua layanan hampir semua ada pada aplikasi tersebut, salah satunya adalah aplikasi "*Nglarisi*". Program *Nglarisi* ini mewadahi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bidang kuliner,. Namun, temuan di lapangan pertemuan rutin ini, sudah tidak dilaksanakan khususnya melibatkan ke-lima *stakeholder* tersebut. Pertemuan rutin yang tidak terselenggara lagi bukan berarti program *GaGe* terhenti, tetapi hasil dari program ini terlihat hasilnya sampai saat ini adalah terus berjalannya program *Nglarisi*. Pertemuan rutin dulu pernah ada diselenggarakan di DP3AP2KB, tetapi berjalannya waktu sudah tidak diselenggarakan lagi. Program *GaGe* ini justru bisa berkembang dan berhasil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pada turunan program *GaGe* yaitu *Nglarisi*. " (Prasojo, 2024).

Proses kolaborasi (*Process Collaboration*), Proses kolaborasi merupakan inti dari implementasi *Collaborative Governance*, interaksi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan diwujudkan secara konkret. Menurut Ansell dan Gash, proses ini terdiri dari lima elemen kunci yang saling terkait, yaitu:

Dialog tatap muka (*face to face dialogue*), merupakan fondasi utama dalam proses kolaborasi. Pertemuan formal, seperti forum lintas sektor, dan pertemuan informal, seperti diskusi komunitas, memberikan ruang bagi *stakeholder* untuk menyampaikan pandangan, mendiskusikan isu-isu penting, dan mencari solusi bersama. Dialog rutin ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan kesepakatan yang solid. Kegiatan dialog ini sering diselenggarakan pada saat program ini diluncurkan dalam forum pemerintah daerah maupun wilayah, namun saat ini kegiatan dialog cenderung dilakukan bersama mitra yang sudah terbentuk ketika program ini sudah diimplementasi. Seperti Bappeda bersama korporasi, Kesra dengan Dinas Tekait dan Kampung/Kalurahan/Kecamatan, dan DP3AP2KB dengan LPMK sebagai koordinator di tingkat kelurahan atau komunitas, demikian juga kampung/Masyarakat berdialog dengan Kalurahan. Pertemuan dan dialog dulu pernah ada diselenggarakan di DP3AP2KB, tapi berjalannya waktu sudah tidak diselenggarakan lagi, (Prasojo, 2024). Pemkot selalu mengajak semua elemen tersebut untuk berpartisipasi dan bisa terlibat dalam menangani isu atau masalah di Kota Yogyakarta sesuai dengan kapasitasnya, (Rinawati, 2024). Pemkot sejak awal mengadakan pertemuan atau dialog, kemudian memberikan pelatihan hingga memberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan jamuan makan dan minum dilingkungan pemkot hingga sekarang. Kecamatan dan kelurahan juga selalu meminta kita setahun sekali untuk terlibat dalam musyawarah atau pertemuan rutin kecamatan maupun dalam forum komunikasi di tingkat kalurahan, (Mikatsih, 2024). Pertemuan formal dan informal memberikan ruang untuk berbagi pandangan dan penanganan masalah di Kota Yogyakarta. Dialog tatap muka merupakan fondasi utama dalam proses kolaborasi.

Membangun kepercayaan (*trust building*), Kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ditingkatkan melalui transparansi kebijakan, komunikasi terbuka, dan keberhasilan awal program. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmen dengan melibatkan semua potensi yang ada. Kebijakan-kebijakan mengarah pada jalannya program, sehingga harapan dan tujuan dari program *GaGe* dapat tercapai. Proses pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan telah berhasil dirasakan oleh masyarakat. Masing-masing *stakeholder* dapat memanfaatkan

potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya. Pemerintah Kota berhasil membangun kepercayaan dengan berkomitmen dalam menjalankan program *GaGe*, mulai dari keberpihakan Pemkot, kebijakan hingga pelaksanaan program. Adanya surat edaran dan intruksi dari walikota, semua perangkat daerah diimbau untuk memesan makanan di *Nglarisi*. Kelompok-kelompok UMKM menggandeng keluarga miskin, kelompok-kelompok ini mewakili kelompok binaan, seperti dari beberapa dinas terkait, seperti kelompok tani dari dinas pertanian, Kube (Kelompok Usaha Bersama) dari dinas sosial dan lain-lain. Secara menyeluruh pembinaan dari dinas koperasi dan umkm, terdata dalam kelompok *Nglarisi*. Kelompok yang mendaftar di *Nglarisi* tidak tertutup, artinya bisa dari kelompok mana saja, kelompok-kelompok tersebut bagaimana menggandeng keluarga-keluarga miskin itu supaya bisa lebih berdaya, (Prasojo, 2024). Membangun kepercayaan merupakan fondasi krusial dalam proses kolaborasi, karena tanpa kepercayaan, upaya bersama untuk mencapai tujuan program akan sulit terwujud. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian interaksi dan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen dan integritas dari setiap pihak. Membangun kepercayaan ini juga dirasakan oleh pelaksana program pada tingkat UMKM. Pemkot mempunyai anggaran yang setiap tahun harus dibelanjakan berwujud makan dan minum, tetapi selama ini yang bisa mengakses adalah toko-toko besar, dan katering besar, kami sekarang memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui UMKM, (Mikatsih, 2024). Dengan terbangunnya kepercayaan, kolaborasi dalam program *GaGe* menjadi lebih solid dan berkelanjutan. Kepercayaan yang terjalin tidak hanya mempermudah proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan partisipasi aktif dari semua pihak. Hal ini menjadi bukti bahwa *trust building* bukan hanya sekadar prasyarat, melainkan elemen kunci yang menentukan keberhasilan program kolaboratif dalam jangka panjang. Kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dibangun melalui transparansi kebijakan, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, dan pelaporan berkala tentang capaian program. Selain itu, keberhasilan awal program, seperti peningkatan pendapatan UMKM, menjadi bukti nyata yang memperkuat kepercayaan para pihak.

Hasil evaluasi terkait banyak data tidak tercatat di program *Nglarisi*, sehingga data yang seharusnya ada di program *Nglarisi* jadi tidak valid, seperti banyaknya order, omzet dan lain-lain. Hal ini terlihat adanya kesenjangan anggaran antara jamuan makan minum sama realisasi omzet di sistem *Nglarisi*, (Prasojo, 2024). Data dari Bappeda, secara perbandingan, terlihat cukup jauh perbandingan omzet kumulatif di SIM *Nglarisi* dengan

Realisasi Belanja Makan Minum Rapat dari tahun 2020-2022 masih cukup rendah. Perbandingan di tahun 2020 sebesar 27,52%, sedangkan di tahun 2021 turun drastis dengan hanya sebesar 8,69%, dan data terakhir di tahun 2022 perbandingannya hanya sekitar 7,34%. Dapat dilihat bahwa tidak sampai $\frac{1}{4}$ anggaran yang ada dialokasikan untuk membeli produk dari UMKM di *Nglarisi*, bahkan data di tahun 2021-2022 menunjukkan tidak sampai angka 10%. Penurunan angka persentase yang sangat signifikan tersebut tentunya dapat memunculkan beberapa praduga seperti misalnya tidak semua Perangkat Daerah (atau mayoritas) di lingkungan Pemkot Yogyakarta memesan makan minum rapat di Kelompok *Nglarisi* atau mereka memesan di Kelompok *Nglarisi* tetapi tidak melalui SIM, (Bappeda, 2023). Pentingnya data order atau pemesanan melalui aplikasi ini akan memberikan data yang update atau terbaru terkait seberapa banyak serapan anggaran yang sesungguhnya digunakan dalam mendukung program ini. Aplikasi pendukung seperti *Whatsapp* (WA) masih bisa digunakan untuk konfirmasi yang *fast respon* agar kekhawatiran order tidak sampai atau tidak diketahui bisa dihindari. Pada saat pengaplikasian *Nglarisi* sebagian besar kelompok masih menemui kendala dalam mengakses aplikasi tersebut, tercatat 51% dari Kelompok *Nglarisi* masih menemui kendala dalam mengakses *Nglarisi*. Kendala yang menjadi keresahan mereka adalah notifikasi aplikasi yang terlambat masuk sehingga mengganggu proses produksi pesanan dan mereka mengakui bahwa banyaknya anggota yang kurang memahami teknologi menjadi kendala ketika mengakses aplikasi ini (Disperinkoukm, Report Analisis Survey Terhadap Evaluasi Aplikasi e-Nglarisi, 2023).

Pelanggan atau *customer* yang memanfaatkan produk Kelompok *Nglarisi* terbagi ke dalam dua kategori, yaitu dari Pemkot Yogyakarta dan luar Pemkot Yogyakarta. Hasilnya customer dari luar pemkot lebih banyak dengan persentase 55% dibandingkan dengan persentase customer dari pemkot sebesar 45%. Sebagian besar OPD tidak menggunakan aplikasi *Nglarisi* untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat adalah karena mereka lebih memilih memesan secara langsung dan pemesanan dilakukan via *WhatsApp*. Hal ini dilakukan karena dirasa lebih cepat. Secara umum latar belakang ini dilandasi karena pelaksanaan rapat dinas seringkali mendadak dan tidak terencana. Artinya, apabila menggunakan aplikasi E-*Nglarisi* membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pesan secara langsung, (Disperinkoukm, Analisis Survey Terhadap Evaluasi Aplikasi E-Nglarisi, 2023).

Komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), semua *stakeholder* menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan program. Kesiediaan untuk berkontribusi secara aktif menjadi indikator keberhasilan kolaborasi. Pertemuan koordinasi

rutin *stakeholder* yang dikoordinatori oleh Bappeda, dan saya pernah mengikuti pada saat itu di masa pandemi, yaitu pada awal program ini dijalankan. Saya pernah ikut koordinasi dengan 5K, di forum sarana kita (Pemkot Jogja) untuk bisa menyampaikan isu yang sedang berkembang dan membutuhkan penanganan bersama. (Rinawati, 2024). Dari 5K menumbuhkembangkan *GaGe* di UMKM, seperti kampus UNU (Universitas Nahdatul Ulama) mengadakan pelatihan dan membantu dalam pengembangan UMKM. CSR dari Bank BPD pernah mengadakan pelatihan, hingga penawaran kredit lunak, dan dari komunitas Gerakan Bina Dapur Indonesia (GBDI) mengadakan pelatihan masak berkelas *chef* di *ION*, Pemkot memberikan pelatihan hingga memberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan jamuan makan di lingkungan pemkot hingga sekarang, (Mikatsih, 2024). Dalam program *GaGe*, komitmen ini tercermin dari kesediaan setiap *stakeholder*, mulai dari pemerintah, korporasi, kampus, kampung, hingga komunitas/masyarakat untuk terlibat secara aktif, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan program. Walaupun pertemuan rutin antar semua *stakeholder* sudah tidak diselenggarakan, tetapi program *GaGe* terus berkembang dan berhasil menciptakan iklim kolaborasi diantara *stakeholder* yang ada, (Prasojo, 2024). Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, program *GaGe* berhasil menciptakan momentum kolaborasi yang berkelanjutan.

Berbagi pemahaman (*share understanding*), *Stakeholder* memiliki pemahaman bersama tentang tujuan program, yaitu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terus diperkuat melalui sosialisasi, pelatihan, dan publikasi informasi. Dengan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat bekerja selaras dan menghindari konflik kepentingan. Kami dahulu berpartner dengan Ibu V, tetapi kemudian masing-masing berdiri sendiri, karena saya lebih memeratakan atau memberdayakan kampung, berorientasi pada sosial dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kami, (Mikatsih, 2024).. DP3AP2KB sebagai support dalam menjalankan program ini khususnya pada pemberdayaan wanita, artinya sesuai kapasitas kami, (Rinawati, 2024). Program ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi pemberdayaan maupun mengangkat pendapatan bagi kaum miskin. Misinya baik dan arahnya pada mengentaskan kemiskinan, kelompok atau komunitas penyedia makan, mengajak masyarakat disekitarnya untuk terlibat, mendapatkan order dari pemerintah kota. Komunitas penyedia makanan tersebut mengajak atau melibatkan masyarakat miskin, (Prasojo, 2024). Berbagi pemahaman adalah elemen penting dalam proses kolaborasi, di mana semua pemangku kepentingan harus memiliki persepsi dan tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan program. Pada indikator ini dapat berjalan efektif, karena semua pihak memiliki pandangan yang selaras tentang tujuan dan

strategi yang harus diimplementasikan. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat sinergi antar-*stakeholder*, sehingga kolaborasi menjadi lebih bermakna dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Kemenangan jangka menengah (*intermediat outcomes*), Keberhasilan jangka menengah, seperti meningkatnya pendapatan UMKM yang terlibat dalam program dan terbukanya akses pasar baru melalui jaringan sektor swasta, menjadi indikator positif dari program ini. Keberhasilan ini memberikan motivasi tambahan bagi *stakeholder* untuk melanjutkan kolaborasi dan berinvestasi lebih lanjut dalam pengembangan program. Di tempat kita (Pakudaya) sekarang sedikitnya ada 11 orang masyarakat yang membantu dalam memenuhi pesanan makanan, mulai ada yang masak, belanja, packing, hingga yang mengantar atau penagihan. Dari tahun- ke-tahun omzet terus meningkat, (Mikatsih, 2024). Program *GaGe* ini bisa berkembang dan berhasil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, (Prasojo, 2024). Model pembayaran di institusi pemerintah daerah biasanya tidak bisa tunai tetapi dengan jangka waktu, sehingga anggota *GaGe* berhenti karena kekurangan modal, (Mikatsih, 2024). Program ini juga membutuhkan modal yang tidak sedikit dan komunitas tersebut tidak semua memiliki modal yang cukup. Tantangan utama adalah modal, kalau transaksi dengan pemerintah pencairannya tidak bisa langsung, artinya UMKM harus menyediakan makanan terlebih dahulu baru dicairkan, (Prasojo, 2024). Dengan tercapainya kemenangan jangka menengah, program *GaGe* membuktikan bahwa kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dapat menghasilkan dampak nyata dalam waktu relatif singkat. Kemenangan ini tidak hanya menjadi pencapaian bersama, tetapi juga menjadi fondasi untuk melanjutkan program ke tahap yang lebih besar dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa *intermediate outcomes* bukanlah akhir, melainkan langkah awal menuju transformasi yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Dilihat dari sudut pandang dari 5K atau stakeholder utama, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota, mempunyai peran sebagai inisiator kebijakan, fasilitator, dan regulator. Pemerintah Kota Yogyakarta berperan dalam membentuk kerangka kerja, menyediakan kebijakan awal, serta memastikan program berjalan sesuai aturan. Kontribusi terlihat pada pemberian pelatihan, akses pasar, dan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM dalam penyediaan makanan di lingkungan OPD. Capaian kolaborasi telah efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkuat UMKM lokal sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Kampung, berperan sebagai pelaku utama dalam implementasi program. Mereka adalah penerima manfaat sekaligus penggerak utama

program.. Korporasi, berperang sebagai mitra strategis dalam hal pembiayaan, pemasaran, penyediaan pasar, pelatihan usaha dan penyediaan modal. Hal ini meningkatkan citra perusahaan dan memberikan dampak sosial positif melalui CSR. Kampus, mempunyai peran sebagai peneliti dan pemberi rekomendasi kebijakan yang akademis. Kontribusi dengan memberikan pelatihan, dan inovasi berbasis penelitian untuk pengembangan produk masyarakat. Komunitas berperan sebagai penghubung informasi antara pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat luas, sehingga komunitas ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk berkontribusi mendukung program. Dengan program *Gage* ini, diharapkan menjadikan program ini model keberhasilan yang dapat direplikasi dan berkontribusi pada pengembangan teori *collaborative governance*.

SIMPULAN

Program *GaGe* membuktikan bahwa pola *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), dapat menjadi solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan. Melalui kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, komunitas, korporasi, kampus, dan kampung, program ini menciptakan dampak positif yang luas. Kepemimpinan fasilitatif pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam mengintegrasikan kontribusi semua stakeholder. Program *GaGe* tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan jangka pendek tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dukungan pasar, dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan inklusif dalam program *GaGe* menjadikannya model yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan memanfaatkan modal sosial, kolaborasi *multisektor*, dan struktur kelembagaan yang kuat, program ini dapat menginspirasi solusi pengentasan kemiskinan di wilayah lain. Program ini tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, menciptakan rasa kepemilikan bersama, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kota Yogyakarta menjadi contoh keberhasilan dalam implementasi *CG* untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. *CG* dalam Program *GaGe* berhasil menciptakan ekosistem kolaboratif yang inklusif, yang memastikan semua pihak, terutama yang terpinggirkan, seperti kelompok masyarakat miskin, UMKM kecil, atau komunitas rentan lainnya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memberikan peran, dan menerima manfaat dari program ini. Dukungan dari 5K stakeholder menjadi kunci keberhasilan, di mana setiap pihak memiliki peran dan kontribusi unik. Temuan menarik adalah adanya kendala keterbatasan modal UMKM, terutama dalam

memenuhi pesanan berkelanjutan, kurang optimalnya penggunaan aplikasi *e-Nglarisi* karena preferensi pemesan (OPD) terhadap *WhatsApp* yang lebih cepat, pertemuan rutin diadakan pada awal program dijalankan, tetapi pertemuan rutin yang tidak terselenggara lagi digantikan pertemuan khusus Pemerintah kota dengan bagian dari 5K. Berdasarkan temuan, disarankan untuk: (1) memperbarui Perwal No. 23 Tahun 2018, (2) meningkatkan fungsionalitas aplikasi *e-Nglarisi* dan mengintegrasikannya dengan *platform* lain, (3) memberikan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan akses modal, (4) mengoptimalkan peran kampus dalam pendampingan, (5) memperkuat sinergi 5K melalui forum rutin, (6) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, serta (7) mengembangkan model keberlanjutan dan evaluasi berkala. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam memahami tata kelola kolaboratif menuju *good governance* yang unggul dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Repository Universitas Gorontalo.
- Ansell C., Gash A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (4), 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Bakhtiar, N. A., & Qodir, Z. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013. *Journal UMY*, 207.
- Bappeda. (2023). *Analisis UMKM Nglarisi Pemerintah Kota Yogyakarta 2023, Laporan Kompilasi Kegiatan Magang UPN, UAD dan UNY*. Yogyakarta: Bappeda Kota Yogyakarta.
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research* vol 21(3), 221–236, <https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>.
- BPS. (2024, Mei 10). *Kemiskinan Kota Yogyakarta 2021-2023*. Retrieved from <https://jogjakota.bps.go.id>:
<https://jogjakota.bps.go.id/indicator/154/89/1/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>

- Dari, D. W., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Publikauma*, Vol 10(1), DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/publika.v10i1.6545>, 1-8.
- Disperinkoukm. (2023). *Analisis Survey Terhadap Evaluasi Aplikasi E-Nglarisi*. YOGYAKARTA: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Disperinkoukm. (2023). *Report Analisis Survey Terhadap Evaluasi Aplikasi e-Nglarisi*. Yogyakarta: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta.
- Emerson, K., & Nabstchi, T. (2015). Evaluating The Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance matrix Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Journal Public Performance and Management Review*, 718.
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Pers.
- Goliday, A. M. (2010). Identifying the relationship between network governance and community action program participation (Vol. 3412973). [Walden University]. http://search.proquest.com/docview/746615990?accountid=13552%5Chttp://primo-direct-apac.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/RMITU/RMIT_SERVICES_PAGE??url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+%2C88.
- Howard Lune, Bruce L Berg . (2017). *Qualitative Research : Methods for the Social Sciences*. England: Pearson.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Walton Street, Inggris: Oxford University Press.
- Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 1(2), 365-379.
- KBBI. (2024, Juni 26). <https://kbbi.web.id/model>. Retrieved from <https://kbbi.web.id:https://kbbi.web.id/model>
- Linda, R. E., Hadiwijoyo, S. S., & Purnomo, D. (2024). Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 10 (1), <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.14467>, 75-91.

- Menpanrb, d. (2020, Agustus 12). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Gandeng Gendong Mengentaskan Kemiskinan Kota Yogyakarta*. Retrieved from menpan.go.id: www.menpan.go.id
- Mikatsih, A. (2024, November 30). interview dengan ketua kelompok pemberdayaan sekaligus UMKM dari Pakuncen Budaya (Pakudaya) Culinary Ibu Asri Mikatsih. (D. Yulianto, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nandina, N. T., & Satlita, L. (2024). Implementasi Program Gandeng Gendong Bagi Pekerja Rentan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta. *JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH, Vol 09 (10)*, 1-8.
- Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik V6(3)* , 395-402, DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>.
- Prasojo, B. (2024, Oktober 15). interview dengan Bintang Prasojo, SE. M.Ec.Dev., Ahli Pertama - Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta. (D. Yulianto, Interviewer)
- Putra, E., Elsyra, N., & Zaenuri, M. (2020). Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta : Program "Gandeng-Gendong" . *Tata Sejuta STIA MATARAM Vol. 6(2)*, 571-592.
- Rinawati, R. (2024, Oktober 9). Interview dengan Kabid Dinas DP3AP2KB. (D. Yulianto, Interviewer)
- Silvia, C. (2011). Collaborative Governance Concepts for Successful Network Leadership. . *State and Local Government Review, 43(1)*, 66–71. <https://doi.org/10.1177/0160323x11400211>.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.